

IMPLEMENTASI TATA KERJA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KAMPUNG WRIKAPAL DISTRIK FAKFAK KABUPATEN FAKFAK

Ridha Idrus

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafi'Iyah Fakfak

***Abstract:** This study aims to determine the implementation of work procedures for the administration of village administration. From the research carried out in Wrikapal Village, Fakfak District Fakfak Regency, it was found that: first, the lack of communication within the internal organization of the village government, between the Village head and his officials. Second, village government officials in general are apathetic and are more dominant in choosing to wait for instructions and direction from the village head. Although dominant, they have the motivation to develop villages to be better. Third, inadequate means of supporting the work of government administrative services. Fourth, lack of understanding of the duties and functions of positions held in the village. Fifth, the village community still finds it difficult to obtain correspondence administration due to being often left by the village secretary.*

***Keywords:** implementation, work procedures, management, government administration*

PENDAHULUAN

Secara umum pengertian administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Pengertian administrasi juga dibedakan menjadi dua yaitu pengertian administrasi dalam arti luas dan pengertian administrasi dalam arti sempit. Pengertian administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama dari dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi dari catat-mencatat, surat-menysurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang memiliki sifat teknis ketatausahaan. Dewi (2004:33), pemerintahan adalah segala aktifitas, tugas, fungsi dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan

mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara yang dimaksud disini menurut ajaran teokratis adalah mencapai kehidupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada Tuhan. Penyelenggaraan negara oleh pemimpin semata-mata berdasarkan kekuasaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya.

Pengertian Kampung menurut Bintarto (1965:95) merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan Kartohadikusumo menyatakan bahwa Kampung merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah Distrik.

Administrasi Kampung adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan Aparat Kampung serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Sejauh ini administrasi Pemerintahan Kampung telah terselenggara cukup lama, namun hal ini masih kurang tertib administrasi serta terdapat banyak kekurangan dalam kinerjanya. Hal ini dapat dilihat seperti dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat pengantar dan lain sebagainya yang melibatkan peran Pemerintah Kampung terkesan lambat. Selama ini, masyarakat menganggap bahwa administrasi hanya yang berhubungan dengan Tata Usaha dan Keuangan, namun sebenarnya administrasi tidak hanya mencakup mengenai hal itu saja melainkan segala hal yang berkaitan dengan proses dan kegiatan pembangunan Kampung. Administrasi Kampung dianggap penting, merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Kampung untuk mengetahui pelayanan administrasi yang ada di Kampung, karena masih terdapat banyak permasalahan di Kampung kaitannya dengan administrasi yang dilakukan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang mendiami wilayah Pemerintahan Kampung dimaksud. Kampung dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintah Kampung adalah sentral kekuasaan politik lokal yang dikomandani oleh Kepala Kampung dan Perangkatnya. Posisi Pemerintahan Kampung juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di perkampungan atau dalam sebutan lain disebut Desa.

Pembangunan nasional pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah bahkan sampai ditingkat Kampung. Peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah Kabupaten Fakfak Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung pasal 19 yang isinya menyebutkan bahwa; Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi. Kemudian Peraturan Daerah

Pemerintah Kabupaten Fakfak nomor 26 Tahun 2008 Tentang Administrasi Pemerintahan Kampung dalam Pasal 1 Nomor 10 disebutkan bahwa Administrasi Pemerintahan Kampung adalah keseluruhan proses kegiatan pencatataan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dimaksud berarti bahwa; dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Kampung, baik itu Kepala Kampung, sekertaris Kampung, bendahara, Badan Perwakilan Kampung, para Kepala Urusan dan para Ketua Rukun Tetangga harus benar-benar memahami tugasnya masing-masing, sehingga dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan Kampung semua aparatur pemerintah dapat bersinergi dan bermitra dengan baik.

Kepala Kampung mesti benar-benar paham mengenai tugas dan tanggung jawabnya, demikian pula para aparatnya, sistem pelayanan pemerintahan boleh fleksibel dengan menyesuaikan kondisi wilayah pemukiman warga setempat, memprioritaskan program kegiatan yang sifatnya mendasar dan sangat dibutuhkan warga masyarakat Kampung setempat. Mengurangi metode pengambilan keputusan dengan cara kebijaksanaan, karena metode ini hanya berlaku jika kondisi darurat dan membutuhkan penanganan segera, sementara di Kampung Wrikapal selama ini belum pernah menemukan masalah darurat yang membutuhkan metode kebijakan Kepala Kampung. Pengambilan keputusan dengan cara diskusi dengan melibatkan masyarakat untuk mencapai pemufakatan, adalah cara yang dianggap sangat tepat dalam menata keberlangsungan pelayanan Pemerintahan Kampung. Pengadaan dan penggandaan buku-buku panduan tugas pokok dan fungsi bagi Kepala Kampung dan para aparatnya perlu didahulukan, artinya para pejabat Pemerintah Kampung mesti lebih dulu memahami tugas dan fungsinya sebelum melaksanakan tugas pemerintahan di Kampung. Pelayanan administrasi kearsipan dan pemanfaatan keuangan sesuai peruntukannya dapat berjalan sesuai dengan petunjuk yang diperdakan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak.

Berangkat dari pemikiran tersebut dikaitkan dengan kondisi objektif yang terjadi di Kampung Wrikapal Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, sebagai tempat penelitian yang direncanakan, peneliti memfokuskan pada administrasi penduduk, administrasi umum dan administrasi pembangunan. Menurut pengamatan awal peneliti menunjukan bahwa penerapan tata kerja Pemerintahan Kampung, di Kampung Wrikapal belum terlaksana sesuai amanah Peraturan Daerah. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas aparat Kampung yang dilakukan belum tertib, masyarakat masih kesulitan mendapatkan

pelayanan administrasi surat menyurat, misalnya surat pengantar atau surat keterangan, kurang mengkoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif, termasuk jarang mendiskusikan dalam pertemuan Kepala Kampung bersama aparat, guna membahas tata kerja Pemerintahan Kampung, program prioritas pelayanan pemerintahan dan penyusunan peraturan Kampung yang dikhususkan bagi Kampung Wrikapal. Perihal ini adalah hal yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Kampung yang perlu didahulukan, seperti diamanatkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak Nomor 22 Tahun 2008 Pasal 4 Angka 5 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung. Aparat Kampung masih belum paham tugas dan tanggung jawab mereka sehingga dalam melaksanakan tugas terjadi rangkap jabatan yang kondisi ini tidak sesuai dengan kaidah organisasi Pemerintahan Kampung semestinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Tata Kerja

Jika merujuk pada kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pendek kata implementasi adalah bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya. Implementasi hendaknya dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, jika tidak maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan rangkaian kegiatan. Rencana yang sudah dibuat dengan sangat baik tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan atau jika dilaksanakan dengan asal-asalan. Ada banyak sekali rencana hebat yang sudah dibuat akan tetapi tidak pernah terlaksana. Implementasi selain memerlukan aksi nyata juga membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dalam mengimplementasikan suatu rancangan tentu ada saja tantangan dan hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan konsistensi agar seluruh rancangan dapat dilaksanakan dengan benar dan kita bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Menurut usman (2002) Implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada aksi, aktivitas, monoton belaka, tetapi merupakan kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap selesai.

Menurut Guntur Setiawan (2004:39). dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam birokrasi pembangunan menyatakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Tata kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan efisien. Tata kerja dapat juga diartikan sebagai cara melakukan pekerjaan dengan benar dan berhasil guna atau bisa mencapai tingkat efisien yang maksimal. Menurut Octina Ruth tata kerja adalah pembentukan sebuah struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau anggota kelompok. Octina Ruth dalam Novia Risdiani (2012).\

Pendapat ahli yang lain yakni Kamaruddin (1992:836-837) tata kerja pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Sedangkan pengertian tata kerja menurut Ismail masya (1994:74) mengatakan bahwa tata kerja adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.

Pengelolaan Administrasi Pemerintahan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan mempunyai empat pengertian yaitu:

1. Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Defenisi administrasi adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dengan menggunakan infrastruktur tertentu yang efisien dan efektif. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi; catatan, surat menyurat, pembukuan ringan, mengetik, agenda, dan administrasi teknis lainnya.

George terry berpendapat bahwa administrasi adalah perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Siagian.

Jika diartikan secara singkat, pemerintahan merupakan ilmu yang difokuskan untuk mempelajari teknis pengelolaan sebuah negara agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga seluruh kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat terpenuhi dengan baik. Pemerintahan biasanya tersusun atas empat elemen penting yaitu elemen legislatif,

yudikatif, eksekutif, dan juga elemen rakyat. Tanpa empat elemen ini, sebuah pemerintahan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Berikut pendapat beberapa ahli mengenai pengertian pemerintah antara lain; Menurut C. F. Strong (2004), pemerintahan dalam arti luas merupakan setiap aktivitas badan-badan publik yang terdiri dari aktivitas-aktivitas atau pun kegiatan eksekutif, legislatif, dan yuridis dalam upaya mencapai tujuan sebuah negara. Dalam arti yang sempit, C. F. Strong mengungkapkan jika pemerintahan merupakan setiap bentuk aktivitas kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari badan eksekutif.

1. Menurut W. S. Sayre, pemerintahan merupakan sebuah organisasi negara yang menjalankan kekuasaannya terhadap rakyat di negara tersebut.
2. Menurut M. Kusnardi, pemerintahan dapat diartikan sebagai urusan-urusan yang dilakukan oleh sebuah negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat atau pun warga yang dimilikinya dengan jalan memenuhi kepentingan rakyatnya serta menjalankan dan melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara baik dan benar.
3. Menurut U. Rosenal, pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari cara petunjuk kerja ekstern dan intern struktur dan juga proses pemerintahan secara global.
4. Menurut H. A. Brasz, Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari teknis atau pun cara lembaga umum disusun dan difungsikan dengan baik secara intern dan ekstern terhadap warga negaranya.

Administrasi Pemerintahan Kampung

Pamudji (1981:83) Mengemukakan bahwa Administrasi Pemerintahan Kampung adalah administrasi negara atau daerah yang mengejala ditingkat Pemerintahan Kampung. Siswanto (1988:10) Menyebutkan bahwa Administrasi Pemerintahan Kampung adalah rangkaian kegiatan penataan usaha kerja-sama sekelompok orang (aparatur Kampung) untuk mencapai tujuan Pemerintahan Kampung.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya administrasi Pemerintahan Kampung adalah suatu proses manajemen yang meliputi segala kegiatan penataan usaha kerja sekelompok orang atau aparat Kampung untuk mencapai tujuan administrasi Pemerintahan Kampung.

Berdasarkan PERDA Kabupaten Fakfak nomor 26 tahun 2008, bab II pasal 2 mengatakan bahwa jenis administrasi Pemerintahan Kampung dibagi menjadi enam yaitu:

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Kampung.
2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk

3. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Kampung pada buku administrasi keuangan
4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan
5. Administrasi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) adalah kegiatan pencatatan data mengenai BAPERKAM.
6. Administrasi lainnya adalah administrasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan penduduk pada wilayah kerja Pemerintahan Kampung.

METODE

Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti mendapatkan data yang objektif. Pada teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara yang kemudian akan diperoleh data dari hasil wawancara tersebut. Dengan menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu teknik untuk memperoleh data, maka hubungan peneliti dengan narasumber atau informan bersifat independen. Rancangan penelitian dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan penelitian dapat dijalankan dengan baik, benar dan lancar serta memperoleh data informasi untuk selanjutnya diolah oleh peneliti.

Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang menjadi target perolehan referensi penelitian peneliti adalah para informan yakni Kepala Kampung, para aparat Kampung yakni; sekertaris Kampung, bendahara Kampung, KAUR Pemerintahan, KAUR Pembangunan, KAUR Umum, KAUR KESRA, BAPERKAM, lima kepala rukun tetanga dan tiga puluh tiga orang masyarakat, masing-masing mewakili lima RT di wilayah Pemerintahan Kampung Wrikapal.

Sumber data Sekunder yakni; data yang kami himpun dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang berfungsi mengawas dan mendampingi pelaksanaan pemerintahan di wilayah penelitian.

Populasi dan Sampel

Pengertian populasi menurut Sugiono, (2013:90) adalah “wilayah genenarisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan”. Atas dasar tersebut maka bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sebanyak 970 jiwa dan 165 kepala keluarga. Pengertian sampel menurut Arikunto (2006:112) mengatakan bahwa “apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Tetapi bila jumlah subjeknya besar maka dapat diambil antara 10-15% atau 15-25% atau lebih.”

Bila dihubungkan dengan jumlah populasi yang akan diwawancarai sebagai responden bagi peneliti maka $25/100 \times 165 = 41$. Artinya dua puluh lima persen dibagi seratus dikali jumlah populasi kepala keluarga, maka hasilnya peneliti akan menjumpai 41 kepala keluarga sudah termasuk Kepala Kampung dan aparatnya sebagai responden bagi peneliti. Sampel merupakan bagian dari populasi, data yang diperoleh tidaklah lengkap namun jika pengambilan sampel dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah maka biasanya sangat mungkin memperoleh hasil dari sampel cukup akurat untuk menggambarkan populasi yang diperlukan dalam kajian yang diperlukan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Peneliti menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang terdapat di lapangan tentang bagaimana implementasi kebijakan tata kerja pengelolaan administrasi Pemerintahan Kampung dalam pelayanan Pemerintahan Kampung.

2. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi perangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

3. Wawancara

Dalam mewawancarai objek peneliti bertujuan dapat mengetahui pelayanan Pemerintahan Kampung dengan cara menyusun draf pertanyaan yang mengerucut pada implementasi PERDA dalam karya dan pengabdian bagi masyarakat Kampung Wrikapal

Teknik Analisis Data

Proses analisa data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dikumen dan sebagainya, sampai dengan pemeriksaan kesimpulan. Dalam melakukan analisis, data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang dikutip oleh Lexi J. Mokong terdiri dari beberapa tahapan antara lain :

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap peneliti, kemudian diobservasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data yaitu; proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan selama penelitian, tujuan diadakan transkrip data adalah untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian lapangan.
3. Penyajian data yaitu kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk grafik, jaringan table dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin akar sebab akibat dan proporsi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat diuji validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi tata kerja pengelolaan administrasi Pemerintahan Kampung Wrikapal Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, hasil yang peneliti simpulkan dari hasil pengisian kuisioner dan wawancara peneliti adalah sebagai berikut; Sosialisasi penataan administrasi Kampung yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait dinas pemberdayaan masyarakat Kampung kurang direspon oleh Pemerintah Kampung dengan menindak-lanjuti informasi tersebut kepada para warga yang kurang memahami materi dimaksud. Kurang mengkomunikasikan kegiatan pembangunan Kampung, baik persuasif atau dalam rapat, baik rapat saat ada keperluan tertentu, rapat rutin sebulan sekali atau triwulan sekali, kurang dilaksanakan, yang akhirnya tak pernah

tersalurkan komunikasi antara pimpinan Kampung, aparat dan masyarakat, menjalin komunikasi antara sesama aparat-pun kurang terjalin harmonis, kurang pula berkoordinasi dengan pihak Distrik dan melaporkan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung. Hal inilah yang mengakibatkan proses pekerjaan pelayanan Kampung tidak berjalan dengan baik.

Indikator Komunikasi

Untuk mengetahui tingkat komunikasi aparat dan masyarakat Kampung Wrikapal maka peneliti memasukan tabel rekap komunikasi sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Jawaban Aparat Kampung

No	Jawaban Terbanyak	Juml	%	Juml Sampel
1	Sudah Pernah	8	53,3	15
2	Kurang aktif	12	80	15
3	Kurang Adanya Komunikasi	12	80	15
4	Kurang Komunikasi	14	90	15

Sumber: data primer diolah

Tabel 2
Rekapitulasi Jawaban Masyarakat

No	Jawaban Terbanyak	Juml	%	Juml Sampel
1	Pernah Tapi Kurang Paham	14	53,8	26
2	Kurang Aktif	15	57,7	26
3	Pernah Tapi Kurang Maksimal	21	80,7	26
4	Tidak Ada Komunikasi	17	65,38	26
5	Kurang Aktif	25	96,15	26

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya keseragaman jawaban aparat dan masyarakat, dimana untuk indikator komunikasi, belum adanya komunikasi yang baik antar sesama Aparat Kampung dan warga masyarakat diakibatkan Aparat Kampung tidak berada di Balai Kampung sehingga administrasi kependudukan tidak berjalan dengan baik contohnya; masyarakat masih saja kesulitan mendapatkan pelayanan surat-menyurat salah satunya; surat pengantar dan surat keterangan.

Indikator Sumber Daya

Untuk mengetahui tingkat sumber daya aparat dan masyarakat Kampung Wrikapal, peneliti memasukan tabel rekap sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3
Rekapitulasi Jawaban Aparat

No	Jawaban Terbanyak	Juml	%	Juml Sampel
1	Ya	15	100	15
2	Tidak	1	10	15

Sumber : data primer diolah

Tabel 4
Rekapitulasi Jawaban Masyarakat

No	Jawaban Terbanyak	Juml	%	Juml Sampel
1	Ya	26	100	26
2	Tidak	11	42,30	26

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan hasil data di atas, disimpulkan bahwa tingkat sumber daya aparat dan masyarakat Kampung Wrikapal masih kurang, hal ini terlihat dari jawaban responden, yang kesannya tak memahami tugas yang diembangkannya sehingga pelaksanaan pekerjaan Kampung tidak berjalan dengan baik.

Indikator Tanggung Jawab

Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab aparat serta masyarakat Kampung Wrikapal, maka peneliti memasukan tabel rekap Tanggung Jawab sebagai berikut :

Tabel 5
Rekapitulasi Jawaban Aparat

No	Jawaban Terbanyak	Juml	%	Juml Sampel
1	Kurang Taat	15	100	15
2	Belum Maksimal	15	100	15

Sumber : data primer diolah

Tabel 6
Rekapitulasi Jawaban Masyarakat

No	Jawaban Terbanyak	Juml	%	Juml Sampel
1	Belum melaksanakan dgn baik	26	100	26
2	Kurang bertanggung jwb	26	100	26
3	Sdh melaksanakannya	26	100	26

Sumber : data primer diolah

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa aparat Kampung Wrikapal belum maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara baik, selain jawaban masyarakat yang kesal terhadap persoalan tanggung jawab aparat Kampung ini, juga diperoleh jawaban aparat yang menyatakan kurangnya keterlibatan dan kepekaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kampung Wrikapal.

Indikator Pelayanan

Untuk mengetahui tingkat pelayanan aparat dan masyarakat Kampung Wrikapal, peneliti memasukan tabel rekap pelayanan sebagai berikut :

Tabel 7
Rekapitulasi Jawaban Aparat

No	Jawaban Terbanyak	Juml	%	Juml Sampel
1	Kurang Suka	15	100	15

Sumber : data primer diolah

Tabel 8
Rekapitulasi Jawaban Masyarakat

No	Jawaban Terbanyak	Juml	%	Juml Sampel
1	Tidak Puas	26	100	26

Sumber : data primer diolah

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat Kampung Wrikapal belum berjalan dengan baik, yang hal ini disebabkan selain kurangnya sarana penunjang pelaksanaan pelayanan aparat Kampung bagi warganya, juga kesannya aparat Kampung kurang tanggap dalam menemukan solusi atas persoalan sarana penunjang pelayanan dimaksud, oleh karenanya ketidak-puasan adalah jawaban yang menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan aparat Kampung Wrikapal

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang implementasi tata kerja pengelolaan administrasi Pemerintahan Kampung Wrikapal Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak yang peneliti lakukan dalam kurun waktu sebulan, informasi yang peneliti peroleh dari hasil pengisian kuisioner dan rekaman wawancara terhadap 41 responden dengan 4 indikator yang dibagi menjadi dua kelompok responden yakni Kepala Kampung dan aparatnya serta kelompok responden warga masyarakat, disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi dalam internal organisasi Pemerintahan Kampung, antar Kepala Kampung dengan para aparatnya.
2. Para aparat Pemerintah Kampung mayoritas bersikap apatis dan lebih dominan memilih menunggu petunjuk dan arahan dari Kepala Kampung, walau dominan mereka memiliki motivasi untuk mengembangkan Kampung agar lebih baik.
3. Kurang memadainya sarana pendukung pekerjaan pelayanan administrasi pemerintahan.
4. Kurang memahami tugas dan fungsi dari jabatan yang dijabat di Kampung.
5. Masyarakat Kampung masih merasa kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi surat-menyurat akibat sering ditinggal pergi pemangku jabatan sekretaris Kampung.

SARAN

1. Agar maksimal pelayanan administrasi Pemerintahan Kampung, disarankan agar pimpinan Kampung lebih aktif menjalin komunikasi antar para aparatur Kampung atau-pun dengan warga masyarakat Kampung, komunikasinya boleh secara persuasif ataupun formal dalam pertemuan yang diagendakan secara periodik. Sehingga kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus pekerjaan Kampung disetiap tahunnya dapat berjalan dengan baik.
2. Aparat Kampung merupakan satu kesatuan dari sistem organisasi Pemerintah Kampung yang dikomendani oleh Kepala Kampung, karenanya; harusnya para aparat Kampung lebih aktif, sigap dalam menangani persoalan krisis pelayanan administrasi pemerintahan di Kampung.
3. Agar lebih efektif pelaksanaan pekerjaan pelayanan administrasi Pemerintahan Kampung, meng-efisiensikan waktu, maka perlu segera mengkondisikan pengadaan sarana penunjang pekerjaan dimaksud.
4. Perlu memahami tugas dan fungsi dari jabatan yang dijabat para aparat Kampung, sehingga tidak kaku dalam menangani tugas dan tanggung-jawabnya tanpa menunggu petunjuk dari pimpinan Kampung.
5. Butuh itikad baik, merasa bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi surat-menyurat dari seorang sekretaris Kampung, dengan tak banyak meninggalkan Kampung, sehingga kebutuhan surat-menyurat warga masyarakat Kampung dapat terlayani tanpa berkepanjangan menunggu pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aquino, Thomas, Augustinus. 2015. Tujuan Negara. 312. (<http://almadwimahendra>, diunduh 17 Februari 2017).
- Bintaro. 1968. Pola pemukiman desa. Hal 95. PT. Setia Purna Inves-Jakarta
- Dewi 2016. Pengertian Administrasi Secara Umum <http://dwi.blogspot.co.id>
- C. F. Strong 2004 Konstitusi Politik Modern
- Furchan, Arif. 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Surabaya Usaha Nasional
- Hasan, Sendjaja, Soetisna, Momon. 1983. Pokok-pokok pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. Hal 91. Penerbit Alumni.
- Kansil. 1985 Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Hal 374 Buku Antik
- Mahadi. 1994. Etika Profesi Hukum. Hal 32 Sinar Grafika Jakarta.
- Notohamidjojo. 2011. Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab. Hal 91. Yayasan bina darma. <http://rickyanggili.blogspot.com>. Diunduh desember 2017
- Pamudji. 1982 Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di berbagai bidang. Hal 83 Dalam. Saparin 1979. Bersama Membangun Peradaban Islam. Hal 48. <http://hidayatulahkotabandung.blogspot.co.id>. Diunduh desember 2017
- Respita, Reni. 2015. Metode penelitian kerangka konseptual. 05/2015. <http://renirespita.blogspot.co.id>. Diunduh Februari 2018
- Siswanto, Bambang. 2004. Model Ekonometri Deforestasi dan Dampaknya. hal 121. Jurnal Krida Wacana. Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) Jakarta
- Siswanto, Joko 1988. Metodologi Pengajaran Bahasa. Hal 10 Departemen pendidikan dan kebudayaan. Jakarta
- Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Hal 89. Pustaka Pelajar- Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. Objek dan metode penelitian. Hal 299 <http://elib.unikom.ac.id>. Diunduh desember 2017.
- Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi dalam birokrasi pembangunan. Hal 39
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Hal 70
- Wahab, Abdul, Solihin. 2008. Implementasi Kebijakan Hal 65.
- Winarno, Budi 2002. Kebijakan Publik. hal 102 Media Presindo Yogyakarta
- Fakfak, PERDA. 2005. No. 72. Tentang desa

Fakfak, PERDA. 2008. No 22. Tentang organisasi dan tata kerja Pemerintahan
Kampung

Fakfak, PERDA. 2008. No 26. Tentang Adminstrasi Pemerintahan Kampung.